

**PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN PENERBITAN SURAT
TAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI
(Studi Pada KPP Pratama di Kota Bandarlampung)**

Skripsi

Oleh

AS SHAUMI GAHARA



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

EFFECT OF SELF ASSESSMENT SYSTEM AND ISSUANCE OF TAX BILLS TO VALLUE ADDED TAX REVENUE (Study at KPP Pratama in Bandarlampung)

Oleh

AS SHAUMI GAHARA

This study aims to look at the effect of the implementation of self assessment sytem, issuance of tax bills as well as supervision by the tax authorities on VAT revenue realization.

This study uses a quantitative approach, which is an approach that is objective, covers data collection and analysis as well as quantitative data using statistical testing methods. The data used in this research is secondary data obtained from the office of the tax service (KPP) The sample used in this research is purposive sampling method. Based on purposive sampling method, samples are obtained three pratama tax office in Lampung city during the period 2012-2015.

Independent variables used in this study is the number of employers taxable (PKP), the number of letters tax payments (SSP) VAT paid-up, bill tax (STP) VAT was published, and the ratio of the effectiveness of the invoice value-added tax, while the dependent variable for research this is the realization of revenue from VAT.

The test results using the t and F test showed that the variables taxable entrepreneur (PKP) and the letter of tax payments (SSP) positive effect on VAT revenue, while variable mailing tax bills (STP) and the ratio of the effectiveness of STP VAT does not have a significant effect on reception PPN. This study successfully explains that all independent variables jointly affect the dependent variable by 89%. Thus, the influence of other factors not examined in this study was 11%.

pKeywords: Self Assessment System, STPs, Value Added Tax

ABSTRAK

**PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN PENERBITAN SURAT
TAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI
(Studi Pada KPP Pratama di Kota Bandarlampung)**

Oleh

AS SHAUMI GAHARA

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pelaksanaan *self assessment system*, penerbitan surat tagihan pajak serta pengawasan yang dilakukan oleh fiskus terhadap realisasi penerimaan PPN.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yakni suatu pendekatan yang bersifat objektif, mencakup pengumpulan data dan analisis data kuantitatif serta menggunakan metode pengujian statistik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari kantor pelayanan pajak (KPP) Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Berdasarkan metode *purposive sampling*, diperoleh sampel penelitian sebanyak tiga kantor pelayanan pajak pratama yang ada di kota Bandarlampung selama periode 2012-2015. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah pengusaha kena pajak (PKP) terdaftar, jumlah surat setoran pajak (SSP) PPN disetor, surat tagihan pajak (STP) PPN diterbitkan, dan rasio efektivitas surat tagihan pajak pertambahan nilai, sedang variabel dependen untuk penelitian ini adalah realisasi penerimaan PPN.

Hasil pengujian dengan menggunakan t dan uji F menunjukkan bahwa variabel pengusaha kena pajak (PKP) dan surat setoran pajak (SSP) berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN, sedangkan variabel surat tagihan pajak (STP) dan rasio efektivitas STP PPN tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN. Penelitian ini berhasil menjelaskan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen sebesar 89%. Dengan demikian, pengaruh faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini sebesar 11 %

Kata Kunci : *Self Assessment System*, Surat Tagihan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai

**PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN PENERBITAN SURAT
TAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PPN
(Studi Pada KPP Pratama di Kota Bandarlampung)**

Oleh

AS SHAUMI GAHARA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2016**

Judul Skripsi

**: PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*
DAN PENERBITAN SURAT TAGIHAN
PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (Studi Pada KPP
Pratama di Kota Bandarlampung)**

Nama Mahasiswa

: As Shaumi Gahara

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1211031011

Jurusan

: Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., CPA.
NIP 19590909 198903 1 004

Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A., Akt.
NIP 19800625 200604 0 001

2. Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19620612 199010 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

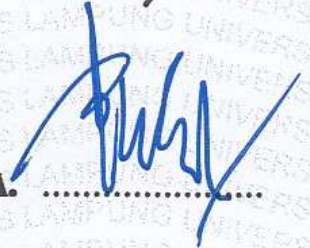
Ketua : R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., CPA.



Sekretaris : Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A., Akt.



Penguji : Drs. Ahmad Zubaidi I., M.M., C.A., C.P.A.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP 19610904 198703 1 011



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 05 Oktober 2016

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : As Shaumi Gahara

NPM : 1211031011

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “ Pengaruh Self Assessment System dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada KPP Pratama di Kota Bandarlampung) ” telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan merupakan hasil karya sendiri, bukan jiplakan hasil karya orang lain dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi lainnya. Sepanjang sepengetahuan saya, skripsi ini belum pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain kecuali yang diacu secara tertulis dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, Oktober 2016



As Shaumi Gahara

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Bandarlampung tanggal 02 Maret 1994 sebagai putri kedua dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Wawan Hernawan dan Nyimas Sa'diyah. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Guna Tria Putra, Bandung pada tahun 2000, Menamatkan pendidikan dasar di SDN. Cisaranten Kidul 1 Bandung pada tahun 2006. Penulis menyelesaikan pendidikan menengah tingkat pertama di SMP Negeri 22 Bandarlampung pada Tahun 2009 dan menyelesaikan pendidikan menengah tingkat atas di SMA Negeri 2 Bandarlampung pada tahun 2012.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2012 melalui jalur Ujian SNMPTN Undangan dan berhasil lulus ujian komprehensif pada tanggal 05 Oktober 2016. Selama menjadi mahasiswi, penulis aktif dalam UKM –U Bulutangkis Unila, UKMF HIMAKTA (Himpunan Mahasiswa Akuntansi), dan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) FEB Unila, sebagai anggota dan pengurus pada tahun 2012 – 2016.

MOTTO

Man jadda wajada

(Barang siapa yang bersungguh - sungguh pasti dapat)

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri”

(QS. Ar - Ra'd :11)

Do what you love, Love what you do

Sesungguhnya kita tidak akan pernah terjebak pada suatu kondisi yang buruk jika kita menyukainya.

(ASG)

Usaha tidak akan mengkhianati hasil

(Anonim)

PERSEMBAHAN

لِلَّهِ الْعَالَمِينَ

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT ,atas rahmat dan hidayahnya, aku persembahkan sebuah karya nan kecil ini kepada :

Kedua orang tua tercinta Ayahanda Wawan Hernawan dan Ibunda Nyimas Sa'diyah, terimakasih atas seluruh kasih sayang, dukungan serta doa yang selalu menyertai setiap langkahku demi mencapai keberhasilan dan kesuksesanku

Kakakku tersayang Auliani Gahara yang selalu menjadi contoh, motivator, dan kompetitor dalam hal-hal positif.

Teman-temanku, terimakasih atas kebersamaan dan kesetiaannya selama ini

Serta Almamaterku Universitas Lampung
Khususnya keluarga besar Jurusan Akuntansi yang telah menjadi tempat menimba ilmu untuk dapat meraih cita-cita ku dalam menuju kesuksesan

SANWACANA

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Self Assessment System* dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada KPP Pratama di Kota Bandarlampung)”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan dan rintangan. Namun, kesulitan dan rintangan tersebut dapat diatasi berkat ketekunan dan kesabaran penulis serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, sudah selayaknya lah pada kesempatan ini penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt. sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si. sebagai Sekertaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., CPA sebagai Dosen Pembimbing Utama, Sekaligus Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu untuk penulis guna memberikan bimbingan, arahan, masukan, nasihat dan perhatian dengan penuh kesabaran mulai dari awal perkuliahan hingga proses penyusunan dan penyelesaian skripsi.
5. Ibu Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A., Akt.. sebagai Dosen Pembimbing Kedua, yang telah meluangkan waktu untuk penulis guna memberikan bimbingan, arahan, dan saran-saran dengan penuh kesabaran selama proses penyelesaian skripsi
6. Bapak Drs. Ahmad Zubaidi I., M.M.,C.A.,C.P.A., selaku Dosen Penguji, yang telah memberikan masukan, arahan, dan nasihat untuk penyempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Yenni Agustina, S,E., M.Si.,Akt. Atas pengalaman, pelajaran, dan motivasinya.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan di Jurusan Akuntansi yang telah memberikan bimbingan, pengajaran, pelayanan, dan bantuan selama penulis menempuh pendidikan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung.
9. Seruruh pegawai dan pimpinan Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Bengkulu Lampung, dan seluruh pegawai KPP Pratama yang ada di Bandarlampung, Mas Inu, Kak Yoki, Pak Didik, Kak Fidi, Pak Ganesh, Ibu Diyah, Kak Akbar, Ayu, Kak Fredy, Kak Indra, Kak Adit, Dewo, Kak Syahdan, Kak Irfan, Mba Helen, Pak Adi, Pak Wahyu, Mba Hana, dan yang lainnya yang tidak dapat penulis

sebutkan satu persatu, terima kasih yang sangat besar, atas izin, kemudahan, keramahan, dan kebaikan yang sangat membantu penullis dalam memperoleh data penelitian.

10. Kedua orang tuaku tercinta Papa Wawan Hernawan dan Mama Nyimas Sa'diyah terima kasih atas seluruh limpahan kasih sayang, doa yang tiada henti demi keberhasilan putri bungsu nya, dukungan serta motivasi yang selalu diberikan untukku..
11. Bapak Ganda, guru privatku semasa SMA, yang mengenalkanku akan indahnya akuntansi.
12. Kakanda Auliani Gahara yang selalu memberi dukungan dan doa, serta tak pernah berhenti memotivasi penulis untuk menjadi yang terbaik.
13. Seluruh pihak keluarga yang memberikan semangat dan doa demi terselesainya skripsi ini.
14. *Girlband*, Trida Himma Zevita, Rizky Zakiyah, Priska Wahyurininta terima kasih atas kebersamaannya dalam meniti hari di almamater tercinta, terima kasih untuk jadi yang terdekat dan selalu ada, sampai jumpa di *show* yang sesungguhnya.
15. Adik adikku Nisrima Zainun dan Haryati, terima kasih atas dukungan, perhatiannya, dan curhatannya selama ini.
16. Wanita-wanita tertangguh Triantiya Deally dan Arinuvirda Wijayanti, atas segala dukungan, bantuan, dan semangatnya, semoga kebersamaan ini tetap berlanjut.
17. Teman-teman Galaxy Squad Ayu, Citra, Didi, Mba Elia, Elvi, Eva, Evi, Liana, Mia, Nur Ad ila, Nurul, Priska, Puji, Rizky, Iin, Sri, Susi, Trida, Widya, dan Muthia Terima kasih atas keceriaannya, kebersamaannya, dan segala bantuan

yang tidak dapat dinilai dengan materi dalam proses perkuliahan hingga skripsi ini, semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kesuksesan.

18. Rekan – rekan bazar SNA Lampung, Trida, Elvi, Didi, Ses Ershanti, Adrima, Noni, Huwaida, Indah, Nia, Pipit, Rizky, Sammie, Uus, dan Febri, terimakasih atas pengalaman, kekompakan, lelah, dan kebahagiaan yang telah kita bagi.
19. Tutor – tutor yang tak lelah menjawab setiap pertanyaan dan kebingungan, kak frilly, kak fatma, dan kak lute, semoga ilmunya menjadi amal jariyah. Aamiin.
20. Segenap rekan – rekan seangkatan akuntansi 2012, Yunita Sari, Puspita, Ani, Apri, Bima, Claudia, Donny, Fatkhur, Fatur, Fauzan, Jupe, Hadi, Ayuy, Pandu, Nadia, Sindy, Rexy, Ray, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan semoga kedepan silaturahmi akan selalu terjaga.
21. Untuk rekan rekan Presidium Himakta 2014-2015, Madon, Trida, Evi, Esa, Arul, Dwi, Nopal, Dimas, Amran, Meily, dan Digun, terima kasih sudah jadi partner untuk berproses dan belajar selama di bangku perkuliahan.
22. Presidium BEM FEB Unila, Kabinet muda bertalenta, Madon, Trida Yusmita, Argi, Deri, Helen, Jisung, Ferdinan, Uca, Digun, Edit, Nugi, Putri, Ari, Bagus, Maulidya, Rini, dan Jestin terimakasih atas inspirasi, kebersamaan, dan motivasi, sampai jumpa di kesempatan hebat lainnya orang – orang terhebat!
23. Rekan – rekan UKM –U bulutangkis unila, Mba devi, Kak fadli, Kak Aldino, Kak Adit, Kak Kimto, Bang Arif, Dea, Piping, dll, terima telah menjadi sesuatu yang pertama kali mengajarkan apa itu kampus yang sesungguhnya.

24. Dan terakhir terima kasih untuk semua yang ada selama proses yang saya lalui hingga hari ini, Silitius, Pasal dua, Anggota Aktif Himakta 2014/206, Brigadir muda 2015/2016, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyusun skripsi ini menjadi yang terbaik, semoga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan khasanah keilmuan, khususnya ilmu akuntansi dan bermanfaat bagi para pembaca, Amin.

Bandar Lampung, 05 Oktober 2016
Penulis,

As Shaumi Gahara

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
II. LANDASAN TEORI	
2.1 Definisi Pajak	6
2.2 Teori Pemungutan Pajak	7
2.3 Sistem Perpajakan	9
2.4 Jenis Pajak	10
2.5 Pajak Pertambahan Nilai	12
2.6 Surat Tagihan Pajak	14
2.7 Rasio Efektivitas	15
2.8 Penelitian Terdahulu	17
2.9 Pengembangan Hipotesis	19

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	22
3.2 Populasi dan Sampel	22
3.2.1 Populasi	22
3.3.2 Sample	23
3.3 Variabel Penelitian	23
3.3.1 Variabel Independen	23
3.3.2 Variabel Dependen.....	24
3.4 Definisi Operasional Variabel	24
3.4.1 <i>Self Assessment System</i>	24
3.4.2 Surat Tagihan Pajak	25
3.4.3 Fungsi Pengawasan dalam <i>Self Assessment System</i>	25
3.4.4 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data	26
3.6 Teknik Analisis Data	26
3.6.1 Uji Asumsi Klasik	26
3.6.2 Uji Regresi Berganda.....	28
3.6.3 Uji Hipotesis	29

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	31
4.2 Hasil Pengujian Asumsi Klasik.....	33
4.2.1 Uji Normalitas	33
4.2.2 Uji Multikolonieritas.....	35
4.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	36
4.2.4 Uji Autokorelasi	38

4.3 Analisis Regresi Berganda	39
4.4 Hasil Pengujian Hipotesis	40
4.4.1 Uji Statistik t	40
4.4.2 Uji Statistik F	42
4.4.3 Indeks Determinasi	43
4.5 Pembahasan	44
4.5.1 Pengaruh Pengusaha Kena Pajak Tendaftar terhadap Penerimaan PPN	44
4.5.2 Pengaruh Surat Setoran Pajak (SSP) PPN terhadap Penerimaan PPN	45
4.5.3 Pengaruh Surat Tagihan Pajak (STP) PPN terhadap Penerimaan PPN	46
4.5.4 Pengaruh Rasio Efektivitas Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan PPN	48
4.5.5 Pengaruh Pengusaha Kena Pajak, Surat Setoran Pajak PPN, Surat Tagihan Pajak PPN, Rasio Efektivitas Surat Tagihan Pajak PPN terhadap Penerimaan PPN	50

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan	51
5.2 Keterbatasan Penelitian	52
5.3 Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Indikator Efektivitas	16
Tabel 2	Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3	Hasil Statistik Deskriptif.....	31
Tabel 4	Hasil Uji Normalitas Menggunakan <i>One –Sample Komologrov Smirnov Test</i>	35
Tabel 5	Hasil Uji Multikolonieritas	36
Tabel 6	Hasil Uji Autokorelasi Menggunakan <i>Run Test</i>	38
Tabel 7	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	39
Tabel 8	Hasil Uji Statistik t	40
Tabel 9	Hasil Uji Statistik F	42
Tabel 10	Nilai R^2	43
Tabel 11	Perbandingan Surat Tagihan Pajak PPN Yang Terbit dan Terbayar	46
Tabel 12	Rasio Efektivitas PPN	48
Tabel 13	Rasio Kontribusi STP Terbayarkan Terhadap Penerimaan PPN	49

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Hasil Uji Normalitas	34
Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Penelitian
Lampiran 2	Tabulasi Data
Lampiran 3	Output SPSS

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Benjamin Frenklin (salah satu tokoh revolusioner Amerika Serikat) mengatakan bahwa tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali pajak dan kematian. Pajak merupakan salah satu hal yang terpenting bagi sumber penghidupan suatu negara. Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. (Anggun, 2015)

Untuk itu fiskus selalu melakukan berbagai cara untuk mengefisiensikan dan mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia. Tercatat ada tiga sistem yang pernah digunakan Indonesia dalam pemungutan pajaknya, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding Assessment System*.

Official Assessment System adalah sistem pemugutan pajak dimana fiskus berperan aktif dalam menentukan dan menghitung pajak terhutang wajib pajak. *Self Assessment system* adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak yang berperan dalam menghitung, membayar, serta melaporkan pajak terhutangnya masing – masing, sementara fiskus hanya menjadi pengawas dan pemeriksa. Terakhir *Withholding Assessment System* yaitu adalah sistem dimana pajak

terhutang dihitung, dibayar, dan dilaporkan oleh pihak ketiga diluar wajib pajak dan fiskus.

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 hingga sekarang, Indonesia menganut *Self Assessment System* guna mengefisiensikan sistem pemungutan pajak. *Self Assesment System* digunakan untuk pemungutan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan sebagian pajak bumi dan bangunan. Dalam pelaksanaannya tentu saja tetap terdapat kendala seperti tidak sedikit juga wajib pajak yang kurang paham atau kesulitan dalam menghitung pajak terhutangnya. Selain itu tingkat kejujuran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak terhutang pun masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan rata – rata pengembalian surat pemberitahuan pajak (SPT) hanya 50% dari yang dikeluarkan kantor pajak (Hasanah dan Indriani, 2012).

Selain reformasi perpajakan, hal lain yang dilakukan fiskus untuk memaksimalkan penerimaan adalah melakukan pemeriksaan dan menerbitkan surat tagihan pajak bagi wajib pajak yang tidak tepat dalam membayar pajak terhutangnya. Surat tagihan pajak (STP) adalah surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda (UU no. 16 tahun 2009).

Kondisi perpajakan di Indonesia sendiri belum 100% terealisasi sesuai target. Tercatat kondisi pembayaran PPh tahun 2015 mengalami kenaikan. Dari PPh Pasal 21 terdapat kenaikan yakni 10,62%, atau sebesar Rp 26,554 triliun dibandingkan periode yang sama pada tahun 2014 sebesar Rp 23,996 triliun. Untuk PPh Pasal 23, pertumbuhan tercatat 9,68% atau sebesar Rp 6,328 triliun dibandingkan periode yang sama pada tahun 2014 sebesar Rp 5,687 triliun.

Pertumbuhan yang cukup besar juga dicatatkan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi yakni 8,53% atau sebesar Rp 2,371 triliun dibandingkan periode yang sama pada tahun 2014 sebesar Rp 2,184 triliun. . (Direktorat Jendral Pajak kementerian Keuangan, 2015)

Selain PPh tak kalah penting adalah pajak pertambahan nilai (PPN). PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut *Value Added Tax* (VAT) atau *Goods and Services Tax* (GST).

Dalam kondisinya PPN justru menyumbang *shortfall* terbesar penerimaan pajak yang meleset dari target tahun 2014. Shortfall tersebut sebesar Rp 70,9 triliun, dengan hanya membukukan penerimaan Rp 404,7 triliun atau 85,1 persen dari target Rp 475,6 triliun (Sari, 2015)

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang apa sesungguhnya yang mengakibatkan PPN menjadi penyumbang terbesar *shortfall* penerimaan pajak, sehingga disusun penelitian berjudul Pengaruh *Self Assessment System* dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama yang ada di Bandarlampung tahun 2012 – 2015.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) ?
2. Apakah Jumlah Surat Setoran Pajak(SSP) berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) ?

3. Apakah Jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) PPN yang diterbitkan berpengaruh terhadap penerimaan PPN?
4. Apakah rasio efektivitas surat tagihan pajak (STP) PPN berpengaruh terhadap penerimaan PPN?
5. Apakah Jumlah PKP terdaftar, SSP PPN, STP PPN, dan Rasio Efektivitas STP PPN secara bersama – sama berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh PKP terdaftar terhadap penerimaan PPN.
2. Pengaruh jumlah SSP terhadap penerimaan PPN.
3. Pengaruh jumlah STP PPN yang diterbitkan terhadap penerimaan PPN.
4. Pengaruh Rasio Efektifitas STP PPN terhadap Penerimaan PPN.
5. Pengaruh Jumlah PKP terdaftar, SSP PPN, STP PPN, dan Rasio Efektivitas STP PPN secara bersama – sama berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi khususnya ilmu akuntansi dalam bidang perpajakan baik secara konseptual maupun secara metodologis.

2. Secara Praktis

Memberikan kontribusi kepada lembaga pengelola pajak dalam menilai efisiensi sistem yang sudah berlaku dan mengambil keputusan untuk pengembangan sistem pajak di masa depan.

II. LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro dalam Resmi (2013), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan,dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan ke dua definisi pajak tersebut di atas, maka dapat disimpulkan pajak adalah pungutan wajib berdasarkan undang - undang yang bersifat memaksa oleh negara kepada rakyat tanpa timbal balas langsung namun akan digunakan untuk kemakmuran rakyat.

2.2 Teori Pemungutan Pajak

Menurut Brotodiharjo dalam Resmi (2013), ada beberapa teori yang mendasari pajak, yaitu :

1. Teori asuransi

Menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingan baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi kepada negara.

2. Teori kepentingan

Dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing – masing warga negara. Semakin tinggi tingkat kepentingan dalam perlindungan jiwa, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.

3. Teori daya pikul

Teori ini pada hakekatnya mengandung suatu kesimpulan bahwa dasar keadilan dalam pemungutan pajak adalah terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut dibutuhkan adanya biaya yang harus dipikul oleh warga dalam bentuk pajak. Pokok pangkal teori ini adalah tekanan pajak itu haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul seseorang. Untuk mengukur daya pikul dapat dilihat dari dua unsur yaitu unsur objektif (penghasilan, kekayaan dan besarnya pengeluaran seseorang) dan unsur

subjektif (segala kebutuhan terutama materiil dengan memperhatikan besar kecilnya jumlah tanggungan keluarga).

4. Teori bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan negaranya, yang justru karena sifat suatu negara (menyelenggarakan kepentingan umum) maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Sedangkan rakyat, harus selalu menginsyafi bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban asli untuk membuktikan tanda baktinya kepada negara.

5. Teori asas daya beli

Menurut teori ini fungsi pemungutan pajak dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu yaitu kesejahteraan. Jadi penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu, maupun bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi kepentingan individu dan negara.

2.3 Sistem Perpajakan

Menurut Resmi (2013), ada beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu :

1. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem dimana aparaturnya memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan pajak terhutang setiap wajib pajak berdasarkan undang – undang. Dalam sistem ini keberhasilan memungut pajak semuanya bergantung pada aparaturnya.

2. *Self Assessment System*

Sistem ini adalah sistem yang memberikan kewenangan penuh pada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terhutang mereka berdasarkan undang - undang. Wajib pajak dianggap mampu untuk menghitung pajak, memahami perundang – undangan perpajakan yang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk :

- a. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
- b. Menghitung sendiri pajak terhutang.
- c. Membayar sendiri jumlah pajak terhutang.
- d. Melaporkan serta mempertanggungjawabkan pajak yang terhutang.

Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak itu sendiri. Dalam *self assessment system* ini fiskus hanya berperan sebagai pengawas dan pemeriksa.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ke tiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ke tiga ini dilakukan sesuai dengan perundang – undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ke tiga yang ditunjuk.

2.4 Jenis Pajak

Menurut Sari (2013) pajak dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Menurut subjeknya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang pembayarannya harus dilakukan oleh wajib pajak, tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain. Contohnya adalah pajak penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembayarannya dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain, tidak harus dilakukan oleh wajib pajak. Contohnya

adalah pajak cukai rokok, harusnya dilakukan oleh perusahaan rokok, namun dilimpahkan kepada pembelinya.

2. Menurut lembaga pemungutnya

a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk mendanai pengeluaran negara tersebut. Contohnya PPN dan PPh.

b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah daerah tersebut. Pajak daerah terbagi lagi menjadi : pajak provinsi, contoh Bahan bakar kendaraan dan pajak kabupaten atau kota, contoh pajak hotel.

3. Menurut sifatnya

a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang memperhatikan kondisi kehidupan wajib pajak, contohnya Pajak dari orang yang sudah dengan yang belum menikah berbeda.

b. Pajak objektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan objek pajak tanpa memperhatikan kondisi dari wajib pajak tersebut. Contohnya pajak bumi dan bangunan didasarkan kepada luas tanah/luas bangunan, tanpa memperhatikan kondisi pemiliknya.

2.5 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang kena pajak di dalam daerah pabean.(penjelasan pasal 7 ayat 2 UU no.42 tahun 2009)

1. Subjek pajak pertambahan nilai (PPN)

Dalam UU No.42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan atau Penjualan atas Barang Mewah , Subjek PPN terdiri dari :

- a. Pengusaha kena pajak (PKP)
- b. Pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan sebagai PKP
- c. Orang pribadi yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud atau memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

2. Objek pajak pertambahan nilai (PPN)

Selain subjek pajak yang ditentukan pajak pertambahan nilai (PPN) juga memiliki karakteristik khusus dalam penentuan objeknya. Objek pajak pertambahan nilai (PPN) yang dijelaskan dalam UU. No. 42 tahun 2009 pasal 4 ayat (1) adalah :

- a. Penyerahan barang kena pajak (BKP) di dalam daerah pabean.
- b. Impor barang kena pajak.
- c. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak.

- d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- e. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- f. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak
- g. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak, dan
- h. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

3. Tarif PPN

Selayaknya pajak lainnya, pajak pertambahan nilai (PPN) juga memiliki tarif tertentu. Dalam UU No. 42 tahun 2009 pasal 7, tarif pajak pertambahan nilai adalah :

- a. Tarif pajak pertambahan nilai adalah tarif tunggal yaitu 10 %
- b. Tarif pajak pertambahan nilai 0% diterapkan atas : ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak.

4. Mekanisme pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran

Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang diterima oleh pengusaha kena pajak karena telah melakukan pembelian atau pembayaran barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan menerima faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor

barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan atau ekspor jasa kena pajak. Dalam UU no. 42 tahun 2009 pasal 9 dijelaskan bahwa Pajak masukan dalam suatu masa pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak. Sebaliknya jika pajak masukan dalam suatu masa pajak lebih besar daripada pajak keluarannya, selisihnya merupakan kelebihan pajak (lebih bayar) yang akan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

2.6 Surat Tagihan Pajak

Definisi dari surat tagihan pajak dijelaskan pada UU. No. 16 tahun 2009 pasal 1 ayat (30) yang berbunyi surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Surat tagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak.

Direktur Jendral Pajak menerbitkan surat tagihan pajak dalam hal :

1. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
2. Dari hasil penelitian SPT, terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan atau salah hitung.
3. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi denda dan atau bunga.
4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.

5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur secara lengkap selain :

a. Identitas pembeli (Nama, alamat, dan NPWP pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak) atau

b. Identitas pembeli (Nama, alamat, dan NPWP pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak) serta nama dan tanda tangan (nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak) dalam hal penyerahan dilakukan oleh pengusaha kena pajak pedagang eceran.

6. Pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak, atau

7. Pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan. (UU no. 16 tahun 2009 pasal 14 ayat 2).

2.7 Rasio Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Bastian, 2005). Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar kontribusi yang dihasilkan terhadap pencapaiantujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Menurut pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan yang dilihat dari hasil perbandingan antara realisasi dengan target yang harus di capai.

$$\text{Rasio Efektivitas} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mengukur keefektifan, maka digunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator efektivitas

Klasifikasi Pengukuran Efektivitas Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber : Depdagri, kepmendagri no.690.900.327 tahun 1996 dalam Erwis,2012)

2.8 Penelitian Terdahulu

Pada Tabel 2, dapat dilihat penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti yang berhubungan dengan pajak.

Tabel 2. Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pajak

No.	Judul Penelitian	Penulis	Variabel	Hasil
1.	Analisis Pengaruh Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Tanjung Karang Bandar Lampung	Fatma Ayu Andini (2015)	X = Surat Tagihan Pajak Y = Penerimaan Pajak Penghasilan	Surat Tagihan Pajak (STP) berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan
2.	Pengaruh Self Assesment System dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (KPP Pratama Sleman, Yogyakarta)	Yohanes Kresna (2014)	X ₁ : PKP Terdaftar X ₂ : SSP PPN X ₃ : SPT PPN X ₄ : STP PPN Y : Penerimaan PPN	(1) PKP Terdaftar dan SSP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN, (2) STP PPN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. (3) Tidak ada pengaruh antara SPT Masa PPN terhadap penerimaan PPN. (4) Hasil pengujian secara simultan membuktikan bahwa PKP Terdaftar, SSP

				PPN, SPT Masa PPN, dan STP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN.
3.	Pengaruh Self Assestement System dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (KPP Pratama Surabaya Gubeng, Surabaya)	Ika Nursanti dan Padmono (2013)	X_1 : PKP Terdaftar X_2 : SSP PPN X_3 : SPT PPN X_4 : STP PPN Y : Penerimaan PPN	<p>(1) variabel PKP, SSP PPN dan STP PPN (X_1, X_3, dan X_4) yang memiliki pengaruh terhadap variabel dependen PPN (Y),</p> <p>(2) SPT Masa PPN (X_2) tidak berpengaruh terhadap (Y)</p> <p>(3) Variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap penerimaan PPN adalah variabel PKP (X_1)</p> <p>(4) Variabel PKP, SPT Masa PPN, SSP PPN dan STP PPN (X_1 sampai dengan X_4) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel PPN (Y)</p>

4.	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (KPP Madya dan KPP Tampan Pekanbaru)	Rohmasari Sitio (2015)	X_1 : PKP Terdaftar X_2 : SSP PPN X_3 : SPT PPN X_4 : STP PPN Y : Penerimaan PPN	PKP terdaftar dan SSP PPN berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. SPT PPN dan STP PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.
----	--	------------------------	--	--

2.9 Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh *self assessment system* terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Self assessment system adalah sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia yang mewajibkan setiap wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak terhutangnya sendiri. Melalui sistem ini diharapkan terjadi efisiensi dalam pengelolaan pajak dan terjadi peningkatan penerimaan pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan Kresna (2014) pengusaha kena pajak terdaftar dan surat setoran pajak terdaftar berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN.

H1 : Jumlah PKP terdaftar berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN.

H2 : Jumlah SSP PPN berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN.

2. Pengaruh surat tagihan pajak pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Surat tagihan pajak (STP) adalah surat yang diterbitkan oleh fiskus dalam rangka melakukan penagihan denda pajak maupun sanksi administrasi kepada wajib pajak yang menyebabkan hutang pajak wajib pajak bertambah. Dalam hal penagihan pajak pertambahan nilai pun demikian wajib

pajak yang kurang dalam membayar utang pajak nya akan diperingatkan dengan STP ini guna meningkatkan penerimaan pajak itu sendiri. Hasil penelitian sebelumnya Andini (2015) surat tagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

H3 : Jumlah STP PPN berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

3. Pengaruh fungsi pengawasan surat tagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Fungsi pengawasan dilakukan oleh fiskus dalam rangka menunjang pelaksanaan self assessment system. Dengan pengawasan yang baik diharapkan self assessment system berjalan sesuai prosedur dan terjadi peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai hingga mendekati target yang diinginkan.

H4 : Rasio efektivitas STP PPN berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

4. Pengaruh *self assessment system*, surat tagihan pajak pertambahan nilai, dan fungsi pengawasan surat tagihan pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. *Self Assessment system*, surat tagihan pajak dan fungsi pengawasan pada hakikatnya adalah sistem dan alat guna meningkatkan keefisienan perpajakan serta kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan pajak yang berlaku. Dengan terciptanya keefisienan dan kepatuhan wajib pajak tersebut, diharapkan jumlah penerimaan pajak meningkat.

H5 : Jumlah PKP terdaftar, Jumlah SSP PPN, Jumlah STP PPN, Rasio Efektivitas STP PPN secara bersama – sama berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan yang bersifat objektif, mencakup pengumpulan data dan analisis data kuantitatif serta menggunakan metode pengujian statistik (Hermawan , 2005). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari kantor pelayananan pajak (KPP) Pratama yang ada di Kota Bandarlampung. Data – data tersebut merupakan data – data yang berkaitan dengan *self assessment* dan surat tagihan pajak yang merupakan data time series bulanan selama empat tahun (Januari 2012 sampai dengan Desember 2015)

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Soleh (2005), populasi adalah himpunan atau kumpulan dari semua objek yang akan diteliti. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Provinsi Lampung.

3.2.2 Sampel

Menurut Bungin dalam Juzas (2014), sampel adalah sebagian karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. Pada metode *purposive sampling*, sampel yang digunakan memiliki karakteristik tertentu. Kriteria sampel pada metode *purposive sampling* yaitu KPP Pratama yang ada di Kota Bandarlampung pada periode penelitian Januari 2012 sampai dengan Desember 2015 sebagai data sekunder.

3.3 Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel independen

Menurut Sugiyono (2012) variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi suatu yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Terdapat empat variabel independen pada penelitian ini yaitu : jumlah PKP terdaftar (X_1), jumlah SSP PPN (X_2), jumlah STP PPN (X_3), rasio efektivitas STP PPN (X_4) pada KPP Pratama yang ada di Kota Bandarlampung. Jumlah PKP terdaftar, dan SSP PPN digunakan untuk mengukur pengaruh *self assessment* sebagaimana digunakan dalam penelitian sebelumnya (Kresna, 2014). Berdasarkan penelitian sebelumnya variabel SPT Massa PPN tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN, sehingga variabel SPT Massa PPN dihapus. Pada penelitian yang dilakukan Nursanti dan Padmono (2015) , jumlah STP PPN digunakan untuk mengukur pengaruh surat tagihan pajak. Fungsi Pengawasan diukur menggunakan rasio efektivitas dengan referensi dari penelitian sebelumnya Erwis (2012).

3.3.2 Variabel dependen

Menurut Sujarweni (2015) variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak PPN yang diukur dengan realisasi penerimaan pajak penambahan nilai bulanan untuk periode Januari 2012 sampai dengan Desember 2015.

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Menurut Masri dan Efendi dalam Merlando (2011), definisi operasional merupakan operasionalisasi dari konsep-konsep yang digunakan, sehingga memudahkan untuk mengaplikasikannya di lapangan. Berdasarkan definisi operasional suatu penelitian, peneliti dapat menentukan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel yang terdapat dalam penelitian.

Dalam penelitian ini terdapat empat variabel independen dan satu variabel dependen. Operasional dari variabel-variabel tersebut akan peneliti uraikan dengan mengidentifikasi indikator-indikatornya sebagai berikut :

3.4.1 *Self assessment system*

Self assessment system adalah sistem dimana wajib pajak diharuskan untuk mendaftarkan dirinya sendiri, menghitung sendiri, menyetor sendiri, hingga melaporkan sendiri jumlah pajak terhutangya. Sebagaimana dalam teori pada

Bab II, pelaksanaan *self assessment system* ini dapat tergambar pada X_1 hingga X_2 yaitu :

X_1 : jumlah pengusaha kena pajak (PKP) terdaftar, jumlah PKP terdaftar ini dapat diukur dengan melihat jumlah pengusaha kena pajak yang terdaftar pada KPP Pratama yang ada di Kota Bandarlampung dengan unit data bulanan untuk periode Januari 2012 sampai dengan Desember 2015.

X_2 : jumlah surat setoran pajak (SSP PPN) disetor, jumlah SSP disetor ini dapat diukur dengan melihat jumlah SSP PPN yang disetor kepada petugas KPP Pratama yang ada di Kota Bandarlampung dengan unit data bulanan untuk periode Januari 2012 sampai dengan Desember 2015.

3.4.2 Surat tagihan pajak

Surat tagihan pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Surat tagihan pajak dalam penelitian ini dicerminkan oleh variabel ketiga (X_3) yaitu penerbitan STP PPN. Penerbitan STP PPN diukur dengan melihat jumlah STP PPN yang diterbitkan oleh KPP Pratama yang ada di Kota Bandarlampung dengan unit data bulanan dari Januari 2012 sampai dengan Desember 2015.

3.4.3 Fungsi pengawasan dalam *self assessment system*

Sebagaimana dibahas dalam bab II pada *self assessment system* fiskus hanya berperan sebagai pengawas. Dalam hal ini pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan terhadap penerbitan surat tagihan pajak oleh fiskus yang diukur

menggunakan rasio efektivitas surat tagihan pajak, yang digambarkan oleh variabel ke empat (X_4) yaitu rasio efektivitas surat tagihan pajak.

3.4.4 Penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN)

Penerimaan pajak pertambahan nilai merupakan variabel dependen dari penelitian ini. Penerimaan PPN dalam penelitian ini diukur dengan melihat realisasi penerimaan PPN pada KPP Pratama yang ada di Kota Bandar Lampung dengan data time series unit bulanan dari Januari 2012 sampai dengan Desember 2015.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi. Data berupa dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data tentang *self assessment*, surat tagihan pajak serta penerimaan pajak pertambahan nilai dengan unit data bulanan mulai dari Januari 2012 sampai dengan Desember 2015 yang terdapat di KPP Pratama yang ada di Kota Bandar Lampung.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data terdiri dari uji asumsi klasik, uji regresi berganda, dan uji hipotesis.

3.6.1 Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik terdiri dari: uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji auto korelasi.

a. Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Seperti yang diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik tidak akan valid untuk jumlah sampel yang kecil. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Sedangkan uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (Ghozali, 2013).

b. Uji multikolinieritas.

Uji asumsi klasik multikolinieritas ini digunakan untuk mengukur tingkat asosiasi (*keeratan*) hubungan/pengaruh antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r). Multikolinieritas terjadi jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih besar dari 0,60, sedangkan pendapat lain menyatakan 0,50 dan 0,90. Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,60 ($r < 0,60$). Cara lain untuk menentukan multikolinieritas, yaitu dengan nilai *tolerance* adalah besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan secara statistik dan nilai *variance inflation factor* (VIF) adalah faktor inflasi penyimpangan baku kuadrat, bila VIF dihasilkan antara 1- 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

c. Uji heterokedastisitas

Heterokedastisitas menguji terjadinya perbedaan *variance* residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heterokedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar *Scatterplot*, regresi yang tidak terjadi heterokedastisitas jika titik titik menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka nol, titik – titik data mengumpul hanya diatas atau dibawah saja, penyebarannya tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, penyebaran titik – titik data tidak berpola. (Sujarweni, 2015)

d. Uji auto korelasi

Apabila terjadi gejala korelasi, akan mengakibatkan varian residual (*error term*) akan diperoleh lebih rendah dari pada seharusnya yang mengakibatkan R^2 menjadi lebih tinggi daripada seharusnya, dan pengujian hipotesis dengan t-test dan F-test akan menyesatkan. Untuk menguji hasil-hasil estimasi model regresi tersebut tidak mengandung korelasi serial diantara *disturbance term*-nya, maka dipergunakan *Run Test*. Jika hasil output SPSS menunjukkan bahwa nilai test lebih besar dari 0,05 berarti hipotesis nol diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual *random*, dan tidak terjadi autokorelasi antar residual. (Ghozali, 2013).

3.6.2 Uji regresi berganda

Uji regresi dilakukan sebagai fungsi prediksi akibat dari pengaruh x terhadap y dengan menggunakan rumus :

$$y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

Keterangan :

Y = Penerimaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai

A = konstanta sisipan

B_{x₁} = PKP Terdaftar

B_{x₂} = SSP Disetor

B_{x₃} = STP Diterbitkan

B_{x₄} = Rasio Efektivitas STP PPN

3.6.3 Uji hipotesis

Menurut Sujarweni (2015), untuk menilai ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik F dan nilai koefisiensi determinasi.

a. Uji t

Uji t adalah pengujian koefisiensi regresi parsial individual yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X_i) secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen (Y)

b. Uji F

Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa pengaruh variabel bebas (X₁,X₂,X₃,X₄) secara bersama – sama terhadap variabel bebas (Y). Uji F ini juga dilakukan untuk melihat apakah model layak atau tidak untuk dikembangkan.

c. Analisis index determinasi

Menghitung index determinasi untuk mengetahui besaran pengaruh x terhadap y dengan menggunakan rumus :

$$I = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

I = Indek Determinasi

R = Koefisien Korelasi.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen yaitu jumlah pengusaha kena pajak terdaftar, jumlah SSP PPN disetor, jumlah STP PPN diterbitkan, dan rasio efektivitas STP PPN terhadap realisasi penerimaan PPN pada tiga kantor pelayanan pajak pratama yang berada di Bandarlampung dengan periode penelitian 2012 – 2015.

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa:

1. Jumlah pengusaha kena pajak (PKP) terdaftar berpengaruh positif terhadap realisasi penerimaan PPN dikarenakan pengusaha pajak merupakan subjek dari pajak pertambahan nilai.
2. Jumlah surat setoran pajak (SSP) PPN berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN dikarenakan surat setoran pajak adalah alat dan bukti nyata untuk melakukan pemabayaran pajak terhutang.
3. Jumlah surat tagihan pajak (STP) PPN yang diterbitkan tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN dikarenakan tidak semua dari jumlah yang

diterbitkan berhasil tertagih, dan jumlah STP PPN yang berhasil tertagih rata-rata 62% dari jumlah terbitnya dan masih dalam kategori rendah.

4. Rasio efektivitas STP PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN selain dikarenakan rata-rata rasio efektifvitas yang masih dalam kategori kurang efektif juga karena STP PPN bukan satu-satunya alat yang digunakan fiskus dalam fungsi pemeriksaan dan pengawasannya dibuktikan dengan rasio kontribusi STP PPN terhadap penerimaan PPN yang rendah yaitu dibawah 3%.
5. Jumlah PKP terdaftar, SSP PPN, STP PPN, dan rasio efektivitas berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Hal ini menunjukkan bahwa semakin aktif pengusaha kena pajak menjalankan kewajiban perpajakannya disertai dengan pengawasan yang baik oleh fiskus, akan meningkatkan penerimaan PPN.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini terbatas pada data jangka waktu empat tahun yaitu dari januari 2012 – desember 2015.
2. Penelitian ini terbatas pada penggunaan dua faktor yang menggambarkan fungsi pemeriksaan dan pengawasan dari fiskus yaitu STP PPN dan rasio efektivitas STP PPN.
3. Penelitian ini terbatas pada tiga kantor pelayanan pajak pratama yang berada di kota madya sebagai sampel penelitian.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pihak KPP Pratama yang ada di Bandarlampung hendaknya lebih meningkatkan kinerja dan giat dalam melakukan tindakan penagihan pajak, khususnya dalam penerbitan surat tagihan pajak terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Dengan adanya peningkatan penagihan pajak maka dapat meningkatkan penerimaan pajak.
2. Untuk penelitian selanjutnya, dapat menambah jangka waktu penelitian dan variabel yang menggambarkan fungsi pemeriksaan dan pengawasan fiskus seperti : surat ketetapan kurang bayar (SKPKB), dan surat paksa.
3. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan menambah sampel atau melakukan penelitian di wilayah lain agar hasil penelitian dapat digeneralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggun, F. 2015. *Pengaruh Pelaksanaan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama Tebet Jakarta Selatan*. Bandarlampung. Universitas Lampung.
- Andini, A.F. 2015. *Pengaruh Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Bandarlampung.
- Bastian, I. 2005. *Akuntansi Sektor Publik : Sebuah Pengantar*. Jakarta. Salemba Empat.
- Erwis, N.A. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Makasar Selatan. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudin. Makasar
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS IBM*
- Hasanah, N. dan Indriani, S. *Efektivitas Pelaksanaan Self Assessment System dan Modernisasi Administrasi Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Pajak (Studi Kasus KPP Kebon Jeruk I)*. Wahana Akuntansi 8 (01) : 17 - 35
- Hermawan Asep. 2005. *Penelitian bisnis paradigm kuantitatif*. Jakarta. PT. Grasindo
- Kresna, Y. 2014 *Pengaruh Self Assesment System dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*. Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Merlando, M.J. 2011. *Pengaruh kepemimpinan, struktur, dan system penghargaan terhadap budaya organisasi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bandarlampung. Bandarlampung.
- Nursanti, I dan Padmono 2013. *Pengaruh Self Assesment System dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*. Surabaya. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi STIESIA 1 (2) : 122-136.

- Resmi, S.. 2011.*Perpajakan Teori dan Kasus*.Jakarta.Salemba Empat
- Sari,D.2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Jakarta. Refika Aditama
- Siti, R. 2015. *Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (KPP Madya dan KPP Tampan Pekanbaru*.Jom FEKON 6 (2) Oktober 2015.
- Soleh AZ.2005.*Ilmu Statistik Pendekatan Teoritis dan Aplikatif Disertai contoh Penggunaan SPSS*.Bandung.Rekayasa Sains.SPSS 21. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian*. Alfabeta, Bandung.
- Sujarweni,W.2015.*Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*.Yogyakarta.Pustaka Baru Pres
- Sumarsan,T.2015 *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Indeks
- Tarjo dan Indra. 2006. . *Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System*. Jakarta. JAAI Vol 10 No.1.
- Undang – Undang
- UU No. 16 Tahun 2009 tentang tatacara dan ketentuan umum perpajakan.
UU No. 42 Tahun 2009 perubahan ketiga UU no 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah
- Website
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.2015.*Realisasi Penerimaan Pajak Per 31 Oktober 2015*.
<http://www.pajak.go.id/content/article/realisasi-penerimaan-pajak-31-oktober-2015>.diakses tanggal 20 Desember 2015.
- Sari,EV.2015. Penerimaan Pajak Meleset 90 Triliun.
<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150105184140-78-22529/penerimaan-pajak-2014-meleset-rp-90-triliun/>. Diakses 5 desember 2015.